

VISI, MISI DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005-2010

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan bimbinganNya kami dapat menyusun dan menyampaikan Visi, Misi dan Program Pembangunan Kalimantan Tengah 2005-2010.

Visi, Misi dan Program Pembangunan Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun ini (Periode 2005-2010) disusun berdasarkan apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan dan kami tangkap dari rakyat Kalimantan Tengah setelah kami melakukan perjalanan panjang selama satu setengah bulan ke 13 kabupaten dan 1 kota serta sebagian besar kecamatan dan kelurahan/desa di Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah diberikan karunia potensi sumber daya alam yang berlimpah, sementara kondisi pelaksanaan pembangunan pada saat ini masih perlu terus dipacu demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk membangun Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 15.356.700 hektar sangat diperlukan Visi, Misi dan Program Kerja yang bersifat menyeluruh, terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Pada dasarnya Visi, Misi dan Program Kerja yang kami susun ini merupakan panduan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita semua selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran aparat pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Bumi Tambun Bungai yang kita cintai ini sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG, SH

BAB I

PENDAHULUAN

Penggantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu siklus penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 23 Juni 2005.

Sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, kami dituntut untuk menyusun dan memiliki Visi, Misi dan Program Kerja yang jelas dan tepat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Hal ini penting dalam pelaksanaan tugas menuju pada keberhasilan yang diharapkan selama 5 tahun (2005-2010).

Penyusunan Visi, Misi dan Program Kerja yang telah kami sampaikan kepada KPU Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Maret 2005 masih bersifat makro.

Berikut ini kami sampaikan Visi, Misi dan program Kerja secara mendetail yang kami susun setelah kami melakukan perjalanan panjang selama satu setengah bulan ke 13 Kabupaten dan 1 kota serta sebagian besar kecamatan dan Kelurahan/desa di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, Visi, Misi dan Program Kerja yang kami susun ini berdasarkan apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan dan kami tangkap dari rakyat Kalimantan Tengah. Visi, Misi dan Program Kerja ini telah kami sampaikan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Juni 2005.

Visi, Misi dan Program Kerja yang kami susun ini juga didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam peraturan daerah ini, total luas wilayah Kalimantan tengah adalah 15.356.700 Ha terdiri Kawasan Hutan 10.294.853,52 Ha (67,4%) dan Kawasan Non Hutan 5.061.846,48 Ha (32,96 %). Berdasarkan fungsinya Kawasan Hutan seluas 10.294.853,52 Ha terdiri atas :

1. Hutan Produksi Tetap (HP)	: 4.232.518,38 Ha
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	: 3.784.495,64 Ha
3. Hutan Konservasi	: 1.484.485,60 Ha
4. Hutan Lindung	: 766.392,06 Ha
5. Hutan Tanaman Industri (HTI)	: 21.958,04 Ha
6. Hutan Penelitian dan Pendidikan	: 5.003,80 Ha

Khusus untuk Kawasan Non Hutan dengan fungsi Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lain (KPPL) dan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), diarahkan untuk

dimanfaatkan dalam rangka pengembangan perkebunan , pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan dan sebagainya.

Sedangkan Kawasan Non Hutan seluas 5.061.846,48 Ha terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) | : 2.789.108,09 Ha |
| 2. Kawasan Pemukiman dan penggunaan Lain (KPPL) | : 1.920.054,97 Ha |
| 3. Kawasan Handil Rakyat | : 59.046,34 Ha |
| 4. Transmigrasi | : 137.920.13 Ha |
| 5. Perairan | : 155.716,95 Ha |

Visi, Misi dan Program Kerja kami ini juga memperhatikan pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Provinsi Kalimantan tengah yang telah dimekarkan dari 5 Kabupaten dan 1 Kota menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kalimantan tengah terdiri dari 95 Kecamatan, 122 Kelurahan dan 1.177 Desa dan 66 Kademangan.

Pada dasarnya, Visi, Misi dan Program Kerja kami ini diperuntukkan bagi pembangunan Kalimantan tengah yang sampai dengan akhir tahun 2004 berpenduduk 1.857.763 jiwa atau dengan kepadatan penduduk 12 jiwa/ Km

Untuk membangun Kalimantan Tengah yang luasnya 1,5 pulau Jawa sangat diperlukan Visi, Misi dan Program Kerja yang bersifat menyeluruh, terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta , baik dalam maupun luar negeri.

BAB II

VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA

Sebagai dasar dan langkah kami bekerja dan mengabdikan diri bagi Kalimantan tengah dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) kedepan, kami telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

A. VISI :

“ Membuka Isolasi Menuju Kalimantan tengah yang Sejahtera dan Bermartabat”

B. MISI :

Misi disusun dan difokuskan pada bidang :

1 *Infrastruktur*

Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan , pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai, baik antar Provinsi, antar Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra-sentra produksi disektor/sub sektor pertanian, pertambangan, perikanan/kelautan, kehutanan, perkebunan dan peternakan secara terencana dan terpadu.

2. *Ekonomi*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

3. *Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana*

Peningkatan kemampuan pelayanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana secara berkesinambungan beserta sarana dan prasarananya.

4. *Pemerintahan*

Peningkatan tanggung jawab dan daya tanggap pemerintah dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan public kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dalam kerangka menciptakan effective governance, good governance dan bebas KKN.

5. ***Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia..***
Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan termasuk pertanahan dan pendayagunaan aparat keamanan dalam penciptaan ketentraman dan kedamaian masyarakat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
6. ***Politik***
Pembangunan kehidupan politik yang berkelanjutan dengan dasar toleransi, keadilan dan partisipasi yang berbasis multicultural
7. ***Sosial Budaya dan Agama***
Memperkuat keterbukaan , toleransi kultural dan kerukunan antar agama, suku, ras maupun golongan dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang majemuk dalam kerangka dan semangat serta sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. ***Kepemudaan, Pramuka dan Keolahraagaan***
Meningkatkan dan memberdayakan peranan generasi muda dalam pembangunan, menguatkan sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-masing Kabupaten/Kota, serta meningkatkan prestasi, partisipasi, pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi keolahraagaan dalam mendukung pembangunan dan prestasi olahraga di Kalimantan Tengah.
9. ***Kepariwisataan***
Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata.
10. ***Sumber Daya Alam , Lingkungan Hidup dan Tata Ruang***
Pembangunan Kalimantan Tengah yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan .
Mewujudkan fungsi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang serasi dalam mendukung fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
11. ***Perhubungan dan Telekomunikasi***
Perhubungan :
Dititik beratkan pada peningkatan fasilitas Bandar Udara, baik yang berada di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan pelabuhan laut, pelabuhan ferry dan pelabuhan sungai lainnya, perlu ditingkatkan fasilitasnya.
Telekomunikasi :
Pelayanan telekomunikasi harus ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah baik di Kabupaten/Kota, maupun di Kecamatan-Kecamatan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Titik berat pembangunan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah yang handal dan dapat bersaing di Era Globalisasi.

Pengarusutamaan gender diartikan bahwa peran serta perempuan disejajarkan dengan laki-laki diberbagai aspek bidang, seperti di bidang legislative, bidang Eksekutif dan dimasyarakat.

C. PROGRAM KERJA

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk merealisasikan Visi dan Misi, kami menetapkan Program Kerja untuk masing-masing bidang dalam menentukan langkah operasional selama 5 tahun (2005-2010) sebagai berikut :

1. Bidang Infrastruktur.

Sesuai dengan luas wilayahnya, sangat perlu dipacu percepatan program jalan dan jembatan untuk menembus isolasi di Wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi jalan di Kalimantan tengah sampai dengan 2004 adalah sebagai berikut :

Panjang Jalan Nasional 1.707 Km yang terdiri dari :

- Jalan Aspal : 1.021 Km.
- Jalan kerikil : 358 Km.
- Jalan Tanah : 328 Km.

Sedangkan jalan Provinsi sepanjang 1.059 Km terdiri dari :

- Jalan Aspal : 568 Km.
- Jalan Kerikil : 242 Km.
- Jalan Tanah : 249 Km.

Jumlah jembatan di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2004 sebanyak 363 buah dengan panjang 12.852 m.

Pada umumnya, kondisi jalan dan jembatan di Kalimantan tengah sangat memprihatinkan, sebagai contoh jalan yang menghubungkan Kasongan-Sampit-pangkalan Bun. Kondisi jalan dan jumlah jembatan tersebut tentu saja berdampak negatif bagi perkembangan rakyat di Kalimantan Tengah

Pertama, perpindahan barang, jasa dan orang sangat lamban dengan biaya yang sangat besar. Kedua, usaha produktif masyarakat menjadi kehilangan nilai ekonomisnya yang berimplikasi pada berkurangnya minat berinvestasi di Kalimantan Tengah. Ketiga, kondisi jalan dan jembatan yang memprihatinkan juga berdampak pada terhambatnya rasa saling percaya antara satu dengan lainnya karena proses komunikasi dan interaksi sosial antar sesama warga Kalteng yang tidak lancar. Keempat, dari aspek pelayanan publik, kondisi tersebut juga mengakibatkan biaya yang tinggi bagi masyarakat. Akhirnya, ditinjau dari aspek politis, minimnya kondisi

jalan dan jembatan akan tidak menguntungkan bagi keutuhan Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa program Kerja Prioritas yang akan segera dilakukan adalah :

1.1. *Pembangunan jalan dan jembatan antar Provinsi, antar Kabupaten, antar kecamatan dan antar Desa terisolir di pedalaman.*

Penyelesaian ruas jalan lintas selatan khususnya di Tumbang Nusa merupakan Program Kerja prioritas. Ruas jalan Bereng Bengkel Km. 35 (daerah Tumbang Nusa) akan segera diselesaikan karena punya nilai ekonomi yang sangat strategis, dan pada musim hujan sering banjir yang mengakibatkan terputusnya jalan sehingga arus pengangkutan barang dan jasa terganggu. Dalam rangka menembus isolasi jalan darat dari ibukota provinsi ke 4 Kabupaten di Barito, maka juga mutlak segera dipercepat pembangunan jalan dari Palangkaraya ke Buntok sepanjang 201 Km. Jalur lain yang menghubungkan jalur Palangkaraya-Banjarmasin-Gunung Mas-Sampit-Pangkalan Bun juga menjadi prioritas. Hal ini sangat strategis dan penting dalam rangka peningkatan perekonomian di Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Kelancaran suatu daerah sangat ditentukan oleh lancar tidaknya hubungan dari satu tempat ke tempat lain. Mengingat kondisi wilayah Kalimantan Tengah yang dijuluki Seribu Sungai, maka kami juga akan melaksanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan jalur darat tersebut.

1.2. *Pembangunan jalan, jembatan dan terminal angkutan baik antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa terisolir di pedalaman.*

Menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan, jembatan, terminal, jalur transportasi untuk membuka keterisolasian daerah pedesaan dan memperlancar perekonomian daerah. Untuk ini perlu digali sumber dana dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain seperti Bantuan Luar Negeri dan bantuan swasta.

1.3. *Pemeliharaan, perbaikan jalan dan jembatan.*

Struktur tanah di Kalimantan Tengah terutama pada bagian selatan (hilir) sangat labil (gambut/rawa) mengakibatkan sarana/prasarana jalan dan jembatan yang telah dibangun cepat rusak sehingga mempengaruhi kelancaran transportasi antar daerah.

1.4. *Pemanfaatan dan revitalisasi sarana dan prasarana transportasi baik darat, sungai, laut dan udara.*

Sarana prasarana transportasi baik darat, sungai, laut dan udara merupakan investasi yang sangat berharga. Untuk itu perlu upaya peningkatan pemanfaatan dan revitalisasi sehingga akan bermakna positif bagi peningkatan kepentingan pembangunan pada umumnya, dan bidang ekonomi pada khususnya, seperti pemanfaatan jalan, dermaga/pelabuhan maupun fasilitas Bandar udara yang telah ada. Guna menarik para Investor ke

Kalimantan Tengah, maka diperlukan adanya pembangunan Pelabuhan Laut/Pelabuhan ekspor dan impor di Kalimantan Tengah antara lain : Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang/Seruyan.

1.5. *Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana pemasaran produk-produk lokal.*

Sarana pemasaran produk lokal seperti pasar, rumah potong hewan, tempat pelelangan ikan dan outlet-outlet pemasaran produk lokal lainnya perlu segera dibangun dan dipelihara agar dapat berfungsi secara optimal.

Pengembangan fungsi sarana-sarana pemasaran yang telah ada juga belum optimal, sehingga diperlukan optimalisasi yang didukung oleh pemerintah sejalan dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

1.6. *Pendanaan perbaikan sarana-sarana transportasi tradisional.*

Menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan maupun pemeliharaan bagi pembangunan jalan, jembatan, terminal, jalur transportasi untuk membuka keterisolasian daerah pedesaan dan memperlancar perekonomian daerah. Untuk ini perlu digali sumber dana dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain seperti Bantuan Luar Negeri dan bantuan swasta.

1.7. *Pengkajian yang berkesinambungan secara teknis, kualitas dan kelayakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, terminal angkutan darat dan pelabuhan sungai dalam rangka optimalisasi biaya pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.*

Sekecil apapun infrastruktur yang telah dibangun selama ini merupakan investasi dan modal untuk melangkah pembangunan selanjutnya. Untuk itu perlu ada optimalisasi pemanfaatan sekaligus optimalisasi penyediaan dana pemeliharaan.

1.8. *Pembangunan infrastruktur terutama pada daerah-daerah terpencil kepada Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.*

Wilayah Kalimantan Tengah yang sangat luas sangat memungkinkan untuk pengembangan pembangunan infrastruktur terutama untuk menembus dan fasilitas bagi daerah-daerah terpencil.

1.9. *Pembangunan secara bertahap, terencana dan terpadu jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai serta terminal angkutan darat, baik antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Dusun.*

Dalam melaksanakan pembangunan baik pada saat terbatasnya anggaran maupun ketika ketersediaan dana mencukupi, maka prinsip perencanaan pembangunan berkesinambungan dengan memperhatikan prioritas senantiasa dipegang agar hasil pembangunan benar-benar dapat termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pada saat ini.

- 1.10. *Pembangunan bendungan sebagai upaya optimalisasi potensi bahan pangan.*
 Dalam rangka menunjang program swasembada pangan khususnya beras, maka pembangunan bendungan air untuk irigasi se Kalimantan Tengah menjadi sangat penting dilakukan.
- 1.11. *Peningkatan koordinasi dan optimalisasi secara terencana dan terpadu dalam pemeliharaan jalan, jembatan, pelabuhan sungai serta terminal angkutan darat.*
 Optimalisasi koordinasi secara terencana dan terpadu sangat perlu untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah ada (seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, dan lain-lain).
- 1.12. *Pelaksanaan efisiensi dan optimalisasi pada setiap pos anggaran APBN, APBD dan bantuan luar negeri (grant dan loan) dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.*
 Efisiensi dan optimalisasi anggaran dilakukan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- 1.13. *Penyertaan rakyat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.*
 Meningkatkan kemampuan lokal yang mandiri secara maksimal sehingga lebih mendorong upaya-upaya swadaya pendanaan lokal dalam peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.

2. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2004 sebesar 4,98 %. Dari angka ini, sektor pertanian masih mendominasi sebesar 47,54 % atau hamper separuh dari total PDRB provinsi kita. Sektor kedua terbesar adalah sektor perdagangan sebesar 19,94 %, diikuti pertambangan 0,79 %, industri pengolahan 6,43 %, bangunan 4,2 %, angkutan dan komunikasi 7,43 % dan Jasa 11,05 %.

Sektor pertanian yang menduduki peringkat pertama di atas terdiri dari lima sub sektor, yang masing-masing memiliki sumbangan sebagai berikut :

- Sub Sektor Perkebunan	: 22,56 %
Sub Sektor Kehutanan	: 10,93 %
Sub Sektor Tanaman Pertanian	: 7,72 %
Sub Sektor Perikanan	: 3,04 %
Sub Sektor Peternakan	: 3,29 %

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi di atas belum mampu secara menyeluruh mengurangi/menghapuskan jumlah rakyat miskin di Kalimantan Tengah yang

jumlahnya sebesar 35 % dari total jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tidak otomatis akan menjamin tingkat kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah. Kantong-kantong kemiskinan di Kalimantan Tengah dapat kita temukan baik di pedesaan/pedalaman maupun di kota, termasuk juga di daerah transmigrasi baru maupun desa transmigrasi yang baru menjadi desa definitive, juga di perkotaan.

Untuk mengatasi kemiskinan ini, kami akan mencanangkan program di bidang ekonomi selama 5 tahun. Program ini bersifat makro, dan yang mikro atau sektoral. Program yang bersifat makro adalah berikut ini :

2.1. *Mengeluarkan kebijakan subsidi bunga pinjaman dan kredit murah bagi usaha kecil.*

Dalam rangka mengembangkan usaha menunjang pertumbuhan usaha kecil, kami akan memberlakukan skema pemberian pinjaman bunga rendah, subsidi bunga pinjaman, program subsidi bergulir, bantuan hibah, yang sepenuhnya akan difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Kita bisa belajar dari sistem yang pernah diterapkan di Negara lain tentang pengembangan kebijakan subsidi bagi usaha kecil ini. Kami akan memfasilitasi kemudahan bagi usaha kecil untuk dapat mengakses skema pinjaman usaha kecil terhadap sistem perbankan. Permasalahan klasik usaha kecil dalam mengakses pinjaman ke bank ada dua yakni tingginya agunan dan tingginya bunga. Sistem seperti ini berakibat pada sulitnya usaha kecil untuk mengakses fasilitas perbankan. Pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab individual warga Kalteng dalam mengakses sistem agunan dan atau bunga ini, dengan cara mengambil tanggung jawab sistem agunan dan tingginya bunga menjadi beban pemerintah provinsi. Ini dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab social pemerintah terhadap warganya. Dengan ini diharapkan akan berlangsung kredit tepat sasaran pada pengusaha kecil dan menengah.

2.2. *Kebijakan proteksi bagi usaha kecil dan menengah.*

Masih menyangkut tentang usaha kecil dan menengah. Selain kebijakan pinjaman perbankan, akan dibuat juga kebijakan proteksi harga yang akan memberi kesempatan tumbuh, berkembangnya dan pengkokohan usaha kecil dan menengah atau UKM. Ada dua bentuk proteksi yang akan dilakukan yakni penjaminan harga standard an kedua membuat “rumah pemasaran bersama”. Gagasan “rumah pemasaran bersama” akan digali lebih jauh di bagian poin 2.6. Kalau melihat dari rangkaian produksi, penjaminan harga menyangkut aktivitas produksi dan yang kedua paska produksi. Dengan cara ini harga ikan di Kalimantan Tengah akan selalu stabil baik di musim melaut atau tidak. Ide yang kedua yakni “rumah pemasaran” akan dibuat pemerintah untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan harga, dan diharapkan akan mampu mengendalikan harga.

2.3. *Optimalisasi lembaga-lembaga usaha bersama rakyat bagi usaha kecil.*

Mendorong dan memasyarakatkan lembaga-lembaga usaha bersama rakyat yakni UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui upaya perbaikan

manajemen dan mengarahkan UMKM sebagai unit usaha penunjang.

- 2.4. *Memfasilitasi kerjasama antara pengusaha kecil, menengah dan besar.*
Upaya ini akan dilakukan dengan focus pada unit kecamatan dengan menyesuaikan kondisi di desa yang ada dalam kecamatan tersebut. Selama ini, pengembangan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar berjalan sendiri-sendiri, padahal berada dalam arena produksi yang sama. Pemerintah akan memfasilitasi penjalinan kemitraan atau partnership antara ketiga unit dengan skala usaha berbeda ini.
- 2.5. *Membangun balai Pendidikan, Pelatihan dan Ketrampilan, untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan semangat kewirausahaan dan keahlian berusaha melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi.*
Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Kalteng sangat banyak namun sebagian besar di antaranya tidak memiliki ketrampilan. Karena itu pembangunan/penyediaan fasilitas ditingkatkan untuk tempat pelatihan sebagai usaha memberi ketrampilan/keahlian dan kemampuan manajemen.
- 2.6. *Membangun “Rumah Pemasaran Bersama” lintas sektor ekoomi.*
Usulan ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan proteksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan kebijakan pinjaman perbankan bagi usaha kecil yang telah disebutkan di atas. “Rumah Pemasaran Bersama” dibentuk untuk instrument promosi potensi daerah. Instrumen ini belum dimiliki Kalteng. Sebagai “Rumah Pemasaran Bersama”, pembangunannya melibatkan seluruh komponen terkait dalam bidang ekonomi. Hal ini perlu segera direalisasikan sebagai pusat informasi yang dikelola secara professional sejalan dengan perkembangan kebutuhan rakyat modern.
- 2.7. *Peningkatan bidang ekonomi terhadap sektor/sub sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan/kelautan, dan pertambangan.*
Program reboisasi dan penghijauan lahan kritis dapat dilakukan dengan membuat daerah resapan air yang juga dapat difungsikan untuk pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, program reboisasi seperti produksi hasil hutan juga merupakan investasi jangka panjang yang secara ekonomi akan bermanfaat bagi rakyat. Manfaat jangka panjang berikutnya adalah untuk penangkal terjadinya banjir di Kalimantan Tengah.
Untuk mencapai tujuan ini, metode terpenting yang akan digunakan adalah pelibatan rakyat, memanfaatkan skema yang dirancang oleh Pemerintah Pusat seperti alokasi dana DAK-DR dan GNRHL (Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
Karena sektor pertanian adalah penyumbang terbesar PDRB yakni sebesar 47,54 %, perhatian kami pada sektor pertanian ini harus kami optimalkan, yang terdiri dari :

2.7.1. *Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.*

Dalam rangka mempertahankan swasembada beras di Kalimantan Tengah maka akan dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian tanaman pangan.

Program ekstensifikasi dengan sistem pembuatan irigasi/bendungan untuk pencetakan sawah-sawah baru amat diperlukan di Kalimantan Tengah.

Sedangkan intensifikasi akan ditingkatkan melalui penggunaan teknologi baru di sektor pertanian. Disamping itu perlu terus dipikirkan sumber tanaman lain seperti produksi jagung, kedelai dan sebagainya. Selain itu, kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis sebagai berikut :

- (1) Peningkatan ketersediaan produksi pangan dan hortikultura dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah.
- (2) Mendorong berkembangnya sentra produksi unggulan daerah berskala ekonomi yang berbasis agribisnis.
- (3) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan.
- (4) Meningkatkan luas areal perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah yang diarahkan pada wilayah KPP (Kawasan Pengembangan Produksi) dan KPPL (Kawasan Pengembangan Pemukiman Lainnya) berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003.
- (5) Meningkatkan hasil produksi komoditi perkebunan Kalimantan Tengah.

Kesemuanya ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan hingga mencapai 70 % dari produktivitas potensial. Ada empat target program ini yakni sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pendapatan petani perkebunan sehingga mencapai US \$ 1500-2000 per KK per tahun yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup petani dan rakyat sekitar perkebunan.
- (2) Meningkatkan peranan perkebunan dalam ekonomi daerah agar lebih tinggi dari rata-rata kenaikan kontribusi perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah sebesar 2,8 % per tahun.
- (3) Meningkatkan mutu hasil produk primer dan olahan hasil perkebunan sampai sesuai dengan standar mutu komoditi.
- (4) Pembangunan perkebunan dengan tiga jenis pola yakni :
 - Partial
 - PIR (Perusahaan Inti Rakyat)
 - PBS (Perkebunan Besar Swasta)

2.7.2. *Bidang Kehutanan*

Prinsip penting yang akan digunakan dalam peningkatan PDRB Kalimantan Tengah di sub sektor Kehutanan adalah pemahaman tentang dua hal. *Pertama*, hutan bukan lagi sumber utama penghasilan provinsi Kalimantan Tengah. *Kedua*, hutan di Kalimantan Tengah perlu diberi kesempatan untuk melakukan peremajaan diri secara alamiah. Kebijakan pemerintah pusat pun telah mengurangi harapan pemasukan pada sub sektor kehutanan. Dulu target total produksi kayu Kalteng sebanyak 6 juta meter kubik/thn. Karena kondisi hutan Kalteng yang terus berkurang, amat realistis kemudian kalau kebijakan total produksi diturunkan menjadi 2,4 juta meter kubik/tahun. Kebijakan kami dalam sektor kehutanan ini juga akan mengikuti pola nasional itu, demi memberi kesempatan bagi hutan kita untuk bernafas, dan pelestarian lingkungan hidup. Inti-inti program kami dalam sub sektor kehutanan ini pada dasarnya adalah demi pelestarian lingkungan hidup itu. Lebih konkritnya adalah sebagai berikut :

- (1) Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan, dengan sasaran utama adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah;
- (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam;
- (3) Pengembangan Sistem Usaha Kehutanan Skala Kecil, menengah, dan Koperasi Bagi Rakyat Lokal, dengan sasaran utama memfasilitasi penggunaan sumberdaya bagi kesejahteraan rakyat disamping meningkatkan partisipasi rakyat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan;
- (4) Pengembangan Perencanaan dan Kelembagaan Kehutanan, dengan sasaran utama memfasilitasi penyediaan informasi kelembagaan sumber daya daerah dalam perlindungan sumberdaya hutan;
- (5) Permasalahan Ilegal Logging (pembalakan) akan kami atasi dengan terlebih dahulu menciptakan alternative lapangan pekerjaan lain dan mengalihkan mata pencaharian lama rakyat kita. Ilegal logging telah memberi dampak negative yang nyata bagi kehidupan rakyat Kalimantan Tengah. Antara lain terjadinya banjir luar biasa di beberapa tempat di jalur Sungai Barito dan Sungai Kapuas beberapa bulan lalu yang membawa kerugian tidak sedikit bagi rakyat dan pemerintah. Hutan rusak dan tidak dapat menyerap dan menyimpan air lagi akibat sebagian besar praktek tidak terpuji dengan membat hutan tanpa mematuhi manajemen pelestarian hutan yang benar.

- (6) Upaya preventif pencegahan kebakaran hutan. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena ulah manusia. Situasi ini perlu dianstisipasi dengan melakukan sosialisasi berbagai ketentuan perundang-undangan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Memberi pemahaman pada rakyat tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran dan kepedulian semua pihak. Caranya melalui kegiatan kampanye, pameran dan work shop, dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya adalah menciptakan System Peringatan Dini (Early Warning) yang tentu perlu dibuat landasan hukum, dan juga penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan.
- (7) Perlindungan Taman Nasional Tanjung Puting.
Tanjung Puting merupakan Taman Nasional dengan keanekaragaman hayati di dalamnya baik flora dan fauna. Keamanan Tanjung Puting sebagai Taman Nasional sekarang terancam dengan upaya-upaya masyarakat dengan merambah kayu di hutan Tanjung Puting. Meski komitmen Pemerintah Pusat sangat kuat terhadap perlindungan Tanjung Puting, Pemerintah Daerah tetap perlu mengamankan lokasi Tanjung Puting, dengan memikirkan alternative lapangan pekerjaan di luar perambah hutan, karena Tanjung Puting tersebut merupakan asset Kalimantan Tengah yang sangat berharga sebagai lokasi Taman Nasional.

2.7.3. *Bidang Peternakan*

Program dalam bidang peternakan akan diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan. Ada sembilan upaya peningkatan yang akan kami lakukan, yang meliputi berikut ini :

- (1) Peningkatan produksi bahan pangan secara berkelanjutan untuk memantapkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat alternative non beras yang berakar pada sumber daya alam dan budaya lokal.
- (3) Peningkatan produksi pangan sumber protein hewani, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat.
- (4) Peningkatan keanekaragaman, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan untuk rakyat.
- (5) Peningkatan Produktivitas, kualitas dan produksi komoditas peternakan yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor.
- (6) Peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan

- mulai dari dulu, on farm dan hilir.
- (7) Berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis peternakan dengan wawasan agribisnis yang mampu memberikan keuntungan yang wajar.
 - (8) Meningkatkan partisipasi rakyat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis dan kemajuan perekonomian di pedesaan.
 - (9) Terpeliharanya produktifitas sumber daya alam, plasma nutfah dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

2.7.4. *Bidang Kelautan Perikanan*

Sebagai masyarakat yang hidupnya tidak dapat dilepaskan dari air, sektor kelautan dan perikanan adalah subsektor yang strategis bagi kehidupan rakyat Kalteng. Ada dua program besar yang akan kami lakukan di bidang ini yang meliputi :

- (1) Program Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan-kegiatan meliputi :
 - a) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
 - b) Peningkatan usaha budidaya perikanan.
 - c) Pengembangan teknologi pasca panen.
 - d) Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan Nelayan tentang pembudidaya ikan.
- (2) Program Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan meliputi :
 - a) Pemantapan rencana tata ruang pesisir.
 - b) Penguatan Institusi dan aparat penegak hukum.
 - c) Kegiatan untuk pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang umumnya masih bersifat tradisional.
 - d) Penguasaan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) oleh peternak masih rendah.
 - e) Kelembagaan Peternak dan Kelembagaan Pedesaan yang saat ini masih perlu adanya pembinaan yang intensif.
 - f) Masih terbatasnya bibit ternak unggul khususnya sapi potong, kambing, domba, kerbau dan babi untuk memperbaiki genetic ternak secara keseluruhan.

2.7.5. *Bidang Pertambangan*

Kalimantan Tengah merupakan daerah yang cukup kaya akan bahan tambang, yang baru beberapa jenis bahan tambang diminati investor seperti emas dan batu bara. Untuk penambang emas selain

penambangan ilegal dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh ijin dari Pemerintah, juga marak kegiatan penambangan ilegal dari masyarakat. Kalau penambangan legal pada tahun 2004 dapat memproduksi 13,5 ton, sedangkan kegiatan dari Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) produksinya jauh melebihi penambang legal. Keadaan ini perlu ditata dan diatur landasan hukumnya agar daerah tidak dirugikan.

2.8. *Kependudukan dan Transmigrasi*

Peningkatan pembangunan di daerah pedesaan dan transmigrasi dengan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan, yang meliputi : pertanian dalam arti luas, koperasi, kerajinan dan sektor riil lainnya. Pembangunan bidang kependudukan dan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk menjadikan masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitarnya maju dan berkembang, hidup damai di Kalimantan Tengah.

Program kegiatan transmigrasi berupa :

- a) Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB)
- b) Pembangunan prasarana infrastruktur.
- c) Penempatan Transmigrasi.
- d) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

3. Bidang Pendidikan Kesehatan dan Keluarga Berencana

3.1. Pendidikan

3.1.1. *Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar.*

Suatu daerah akan maju apabila masing-masing memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Karena itu berbicara tentang upaya memajukan pembangunan daerah di segala bidang, diawali, antara lain, dengan memajukan tingkat kesejahteraan tenaga-tenaga pengajar, antara lain melalui penyediaan perumahan dan insentif bagi guru di daerah terpencil.

3.1.2. *Pemberian kesempatan yang adil dan merata kepada pengajar untuk meningkatkan kualitas.*

Peningkatan kualitas dengan memberikan pendidikan dan latihan, pertukaran guru ke daerah-daerah maju, dan penyeteraan persyaratan guru melalui *in-service training* bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah serta peningkatan status guru Bantu dan guru honorer.

3.1.3. *Pembangunan dan pemeliharaan sekolah dan sarana pendukungnya*

yang layak bagi proses pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan telah banyak, namun belum semuanya dengan kondisi layak. Untuk itu, diperlukan pembangunan sekolah yang layak untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada perlu dipelihara. Sarana pendukung sekolah seperti laboratorium dan fasilitas olahraga perlu diberikan. Untuk jangka menengah ke depan, perlu dibuat standar bagi sekolah yang layak untuk pendidikan. Untuk melaksanakan itu semua, keterlibatan masyarakat juga diperlukan.

3.1.4. *Penetapan jaminan mekanisme penyaluran buku-buku pendidikan.*

Salah satu kendala daerah Kalimantan Tengah adalah aksesibilitas terhadap desa/sekolah. Secara bertahap pengadaan buku untuk SD dari tahun ke tahun berangsur meningkat namun didapati masih banyak SD di pedalaman yang tidak memperoleh buku-buku yang diharapkan tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini, jaminan mekanisme penyaluran buku-buku menjadi prioritas.

3.1.5. *Pengadaan rumah baca dan perpustakaan keliling baik melalui darat maupun sungai.*

Sampai saat ini ketersediaan buku-buku untuk pendidikan maupun untuk rakyat di daerah pedalaman/desa sangat terbatas dan langka. Sebagai upaya mencerdaskan bangsa khususnya rakyat di daerah Kalimantan Tengah, akan didorong penyediaan rumah baca dan perpustakaan keliling baik melalui darat maupun sungai sesuai dengan karakter geografis wilayah Kalimantan Tengah.

3.1.6. *Pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dan yang tidak mampu.*

Pelajar dan mahasiswa yang berprestasi namun tidak mampu, akan mendapat perhatian khusus dengan penyediaan pemberian fasilitas beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya.

3.1.7. *Pemantapan program wajib belajar sembilan tahun.*

Wajib belajar 9 tahun merupakan kebijakan pemerintah yang perlu terus didukung dan dikembangkan.

3.1.8. *Penguatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengakomodir muatan lokal (Mulok).*

Dengan ditetapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kesempatan bagi masuknya muatan lokal dalam materi kurikulum semakin terbuka. Sebelumnya ini kurikulum sekolah menggunakan kurikulum standar pusat, maka dapat kita rasakan bahwa murid SD sampai dengan tidak banyak mengetahui kondisi lokal melalui pendidikan. Pengembangan kurikulum berbasis lokalitas perlu dikembangkan agar ketika mereka putus sekolah mereka bisa

merekayasa/memanfaatkan potensi lingkungannya dengan pemahaman yang memadai tentang kondisi dan situasi daerah. Selain itu, akan dilaksanakan pendidikan mengenai lingkungan di sekitarnya, sehingga anak-anak bisa memahami lingkungan tempat mereka tinggal.

3.1.9. *Penguatan Fasilitas, sarana prasarana di Pendidikan Tinggi.*

Adalah realita di dunia ini bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang cerdas. Karena itu pendidikan adalah mutlak untuk dikembangkan. Pengembangan pendidikan sebagaimana program untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan, maka pada pendidikan tinggi diarahkan untuk investasi sumber daya intelektual dengan memperbanyak mencetak tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi strata tinggi (S2 dan S3) melalui upaya-upaya bea siswa baik dari dana Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun negosiasi dengan berbagai lembaga internasional maupun dengan lembaga-lembaga swasta.

3.2. **Kesehatan dan Keluarga Berencana.**

3.2.1. *Peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan rakyat.*

Pengobatan gratis bagi pemilik kartu sehat di tingkat Kecamatan dan Desa melalui Puskesmas dan Posyandu dan membangun pos-pos kesehatan. Selain itu, juga mendorong pemanfaatan obat generic.

3.2.2. *Peningkatan optimalisasi anggaran untuk memberikan peningkatan kesejahteraan pada tenaga kesehatan.*

Suatu daerah akan maju apabila masing-masing memiliki tingkat kesehatan yang memadai. Karena itu berbicara tentang upaya memajukan pembangunan daerah di segala bidang, diawali, antara lain, dengan memajukan tingkat kesejahteraan tenaga-tenaga kesehatan, dengan cara melalui pemberian insentif bagi paramedic yang bekerja di pedalaman termasuk membangun dan memelihara rumah tinggal bagi petugas medis di pedalaman.

3.2.3. *Pembuatan puskesmas keliling baik melalui darat maupun sungai, Memperhatikan kesejahteraan para pekerja kesehatan.*

Rakyat di pedesaan masih terus memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan, sementara keadaan sarana prasarana kesehatan di kecamatan maupun di desa masih sangat terbatas. Agar masyarakat dapat segera menikmati pelayanan kesehatan dengan mudah, maka salah satu caranya adalah penyediaan puskesmas keliling yang dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman.

- 3.2.4. *Penyiapan peralatan medis yang memadai di setiap unit pelayanan kesehatan hingga daerah-daerah terpencil.*
Desa-desa tersebar pada wilayah yang sangat luas dan antara satu desa dengan desa lainnya sangat berjauhan. Demikian juga dari desa ke pusat kecamatan sehingga sangat menyulitkan penduduk menjangkau pusat-pusat fasilitas umum seperti kesehatan pada saat diperlukan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan penyediaan peralatan medis dan obat-obatan sederhana di setiap desa/dusun dan kecamatan.
- 3.2.5. *Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit Umum baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.*
Kabupaten yang telah memiliki fasilitas Rumah Sakit Umum diupayakan adanya peningkatan kualitas pelayanan.
- 3.2.6. *Peningkatan kesehatan ibu dan anak.*
Pemerintah provinsi harus dapat menjamin turunnya angka kematian bayi (infant mortality rate) dan angka kematian ibu melahirkan (natal mortality rate). Selain itu, upaya pemenuhan gizi untuk generasi penerus ini baik melalui imunisasi dan lain sebagainya dapat ditingkatkan.
- 3.2.7. *Peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan yang sehat.*
Dikalangan masyarakat umum tidak kalah pentingnya adalah upaya meningkatkan kesadaran tentang kesehatan ibu dan anak, meningkatkan gizi dan kesehatan balita dan mengurangi kematian bayi dan ibu melahirkan. Untuk ini perlu peningkatan intensitas penyuluhan-penyuluhan baik oleh Pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM).
- 3.2.8. *Peningkatan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda atas bahaya narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.*
Narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang adalah bagaikan api dalam sekam, upaya-upaya ketat pembasmian telah dilakukan, tapi para pelaku tak kunjung jera. Untuk melindungi generasi muda dari bahaya Narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang perlu penggalakan kegiatan penyuluhan agar generasi muda dan masyarakat umumnya menyadari bahaya Narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Selain itu juga akan dikembangkan kegiatan-kegiatan positif yang memfasilitasi perkembangan bakat dan minat generasi muda, misalnya dalam bidang musik, seni dan olahraga.
- 3.2.9. *Peningkatan usaha pelayanan kesehatan bagi para lanjut usia dan kaum difabel, sebagai pemenuhan hak dasar.*
Sedangkan bagi lanjut usia dan kaum difabel diusahakan peningkatan

pemenuhan hak-hak dasar menjadi prioritas.

3.2.10. *Meningkatkan kualitas program Keluarga Berencana untuk memenuhi hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi masyarakat.*

Hal ini dititikberatkan agar terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan penduduk Indonesia, dengan program :

- Program Pemberdayaan Keluarga.
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- Program Keluarga Berencana.
- Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana.

4. Bidang Pemerintahan

Prinsip penting yang akan kami gunakan untuk menguatkan bidang Pemerintahan adalah upaya penguatan fungsi dasar pemerintahan lokal yang meliputi fungsi pelayanan (*servicing*), fungsi pengaturan (*regulating dan policy making*) dan fungsi mengelola sumberdaya (*extracting*).

Penguatan ketiga fungsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ketatapemerintahan yang efektif atau *effective governance*, dengan dua pilar pentingnya yakni partisipatif, transparansi, akuntable dan responsive. Aparat pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya mencapai ketatapemerintahan yang efektif.

Ada beberapa program yang kami rancang demi penguatan peran pemerintah provinsi dan perwujudan tiga pilar pemerintah yang efektif. Lebih rincinya adalah sebagai berikut :

4.1. *Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan mekanisme merit system, yakni yang menerapkan asas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif.*

4.2. *Penciptakan mekanisme penjangkaran aspirasi pada masyarakat berupa :*

4.2.1. *Pembuatan Pos Pengaduan dan tindak lanjut dari proses pengaduan.*

Hal ini dilakukan dengan cara membuka pusat Pengaduan bagi masyarakat atas semua permasalahan pemerintahan yang dihadapi. Masukan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus yang membahas/menelaah berbagai informasi/pengaduan.

4.2.2. *Penyaringan aspirasi masyarakat tentang semua kebijakan.*

Meningkatkan frekuensi kunjungan ke daerah pedalaman atau “turun

ke bawah” untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang diambil/ditetapkan Pemerintah, melalui dialog yang continue. Isu yang dapat dibahas beraneka rupa seperti penjarangan aspirasi untuk pembuatan kebijakan seperti anggaran (APBD). Kedua, membuat forum khusus untuk membahas berbagai agenda untuk memantau sejauh mana program telah dapat dilaksanakan dan bagaimana hasil-hasilnya.

4.2.3. *Pelebagaan mekanisme penjarangan keinginan masyarakat melalui survey keinginan secara berkala.*

4.3. *Pelebagaan dialog dengan public melalui konferensi pers, pembuatan bulletin dan websites Pemerintah Provinsi.*

Pers lokal merupakan mitra penting Pemerintah Provinsi, karenanya ia harus memiliki tempat dalam dinamika sehari-hari pemerintahan. Melalui konferensi Pers secara rutin, diharapkan berbagai kebijakan pemerintahan dapat diketahui public secara luas.

4.4. *Peningkatan pelayanan public.*

Data di lapangan yang menunjukkan masih minimnya sarana pelayanan public seperti air bersih dan listrik yang masih menjadi barang langka di beberapa daerah. Pembangkit listrik tenaga batubara dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Selain itu, akan diterapkan pelayanan yang menerapkan standar pelayanan prima dalam satu atap dalam rangka menyediakan pelayanan public yang cepat, murah dan transparan.

4.5. *Pembuatan Master Plan/Buku Saku pejabat publik.*

Membuat/menyusun data profil daerah sebagai bahan bagi pejabat public agar mampu dan menguasai keberadaan dan persoalan daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengkajian sesuai bidang masing-masing untuk kepentingan masyarakat.

4.6. *Menggunakan anggaran pemerintahan dengan terinci dan terarah.*

Efisiensi penggunaan dana pemerintah yang terbatas sesuai kebutuhan masyarakat yang mendasar. Selain itu, akan diterapkan sistem anggaran yang sensitive terhadap gender (gender budgetary system).

4.7. *Pendirian Pusat Informasi dan Kajian.*

Mendirikan/membentuk Dewan Riset Daerah.

5. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia

5.1. *Membantu dan memfasilitasi kepastian hak atas tanah.*

Rakyat Kalimantan Tengah terutama di pedesaan pada umumnya belum

terbiasa dengan pengurusan hak atas tanah sampai pada sertifikasi. Sejalan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, telah muncul berbagai persoalan yang menyangkut hak atas tanah. Untuk itu perlu diberikan pemahaman dan bantuan pelaksanaan sertifikasi kepada rakyat dengan merevitalisasi peran damang/lembaga adat sebagai rujukan dalam memperoleh kepastian hukum hak atas tanah perorangan maupun hak-hak adapt.

- 5.2. *Meningkatkan peran lembaga-lembaga bantuan hukum.*
Lembaga-lembaga Bantuan Hukum difasilitasi untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik, independent, dengan biayanya yang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.
- 5.3. *Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.*
KKN telah merajalela dan merusak hamper semua sendi kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Ke depan akan lebih digalakkan suatu upaya anti KKN dengan memberi pembelajaran kepada masyarakat serta simpul-simpul pemerintahan yang rawan terjadinya KKN. Untuk menunjang keberhasilan pemberantasan KKN, akan diterapkan standar pelayanan prima kepada masyarakat, serta menindak pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami juga akan berusaha memberi suri tauladan bagi upaya pemberantasan KKN, dan kami tidak segan untuk langsung mengundurkan diri jika kami terbukti melakukan KKN.
- 5.4. *Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang.*
Pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang tidak hanya dilihat dari sisi penggunaannya, tetapi juga terhadap pengedarnya. Untuk itu upaya tegas dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang perlu dilaksanakan secara konsisten.
- 5.5. *Penyelesaian Tapal Batas.*
Penggunaan Wilayah Kalimantan Tengah diakui masih lemah, karena baru sebagian kecil tapal batas dengan provinsi tetangga yang dapat diamankan. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan social terutama dengan masyarakat yang ada diperbatasan. Untuk ini secara bertahap dan pasti harus dimulai secara terencana untuk melakukan negosiasi dengan provinsi-provinsi tetangga yang memiliki wilayah/garis sentuhan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi Kalimantan Tengah hal ini cukup berat karena posisinya di tengah sehingga memiliki garis sentuhan (tapal batas) dengan tiga provinsi tetangga. Langkah kedepan adalah Kalimantan Tengah yang berinisiasi melakukan perundingan-perundingan dengan provinsi tetangga.
- 5.6. *Melakukan perlindungan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap*

perempuan dan anak-anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga.

Kekerasan terhadap wanita dan anak-anak masih sering terjadi. Untuk itu perlu ditangani melalui peningkatan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak, melalui upaya yang bersifat preventif maupun represif.

5.7. *Pelibatan rakyat pada proses kebijakan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah.*

Perlu dibentuk lembaga/badan yang khusus mengumpulkan dan mengkaji berbagai masukan aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk itu akan dirumuskan mekanisme pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

5.8. *Menciptakan rasa aman, kemudahan dan kepastian hukum bagi dunia usaha.*

Dunia usaha memerlukan rasa aman, kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Sehubungan dengan hal ini, aspek perijinan akan dipermudah dengan menerapkan standar pelayanan prima dalam satu atap.

5.9. *Penegakan hukum berkaitan dengan usaha-usaha pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.*

Penanganan masalah Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan masih sangat lemah, untuk itu perlu ada peningkatan penegakan hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum dan komponen-komponen masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam pelestarian lingkungan.

5.10. *Jaminan hukum hak adapt.*

Masyarakat Kalimantan Tengah sangat menghargai budaya dan tata aturan/adat-istiadat. Tata aturan/adat-istiadat menjadi pedoman permanent yang kemudian dipatuhi bersama. Kepatuhan terhadap tata aturan adapt harus mendapat jaminan hukum.

6. Bidang Politik

Prinsip yang digunakan dalam bidang politik adalah bahwa pemerintah perlu menjadi salah satu actor penting dalam penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Penguatan dekomkrasi ini hanya bisa bermakna apabila melahirkan pemerintahan yang efektif (*effective governance*). Arena-arena penguatan demokrasi ini adalah mencakup masyarakat politik, masyarakat sipil, dan Negara atau pemerintah sendiri. Khusus penguatan di tingkat masyarakat, instrument yang dapat digunakan berupa modal social yang telah ada di masyarakat Kalteng seperti rasa percaya.

- 6.1. *Secara berkala mengadakan forum-forum kemasyarakatan.*

Para tokoh masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam deepening democracy khususnya dalam arena masyarakat. Kekuatan tersebut hanya bisa terbentuk apabila sarana atau instrumen pemersatu. Forum pertemuan seperti “Hasupa Hasundau” perlu difasilitasi pemerintah untuk menguatkan modal social yang ada. Forum akan menjadi media komunikasi langsung antara Pejabat Pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri, dan untuk membuka berbagai celah yang tersumbat dalam upaya menciptakan keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah dan antar masyarakat sendiri.
- 6.2. *Pelaksanaan pelatihan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*

Dimaklumi bahwa tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia di Pedesaan sangatlah terbatas. Oleh karena itu untuk memungkinkan mereka dapat mengolah potensi yang ada di desa, maka perlu dilakukan pelatihan pada komponen-komponen Desa sesuai bidangnya misalnya kepada BPD secara rutin dan kontinyu.
- 6.3. *Pelembagaan sistem pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang partisipatif.*

Poin ketiga ini berkaitan dengan bidang penguatan pemerintahan khususnya dalam menguatkan dimensi partisipasi dalam proses policy making atau pengambil kebijakan. Sistem pengawas kebijakan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlu dilembagakan dalam semua lini pengambilan kebijakan.
- 6.4. *Peningkatan pendidikan politik masyarakat.*

Memperhatikan partisipasi masyarakat pemilih sejak dari Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden tahun 2004 yang lalu, maka secara statistika dapat dinilai bahwa masyarakat Kalimantan Tengah telah memiliki pemahaman politik yang cukup baik. Namun hal ini memerlukan penguatan.
- 6.5. *Penguatan lahir dan berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lokal.*

Lembaga-lembaga Swadaya masyarakat dan lembaga lokal pada umumnya memberi manfaat positif kepada masyarakat karena lembaga-lembaga tersebut banyak berfungsi pengembangan aspirasi. Karena itu perlu didorong tumbuhnya berbagai LSM untuk mendukung pemerintah memberikan pembelajaran kepada masyarakat.
- 6.6. *Pelembagaan mekanisme “turun kebawah” sebagai mekanisme untuk mengenal, memahami dan menyerap aspirasi rakyat.*
- 6.7. *Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah.*

Dalam rangka melaksanakan proses pembangunan yang komprehensif dan terpadu di wilayah Kalimantan Tengah, koordinasi dan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan.

6.8. *Mendorong pelaksanaan otonomi desa.*

Dengan memperhatikan sumber daya yang ada potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam, maka secara bertahap Desa-desanya di Kalimantan Tengah diarahkan untuk mandiri yang pada gilirannya menjadi pilar untuk otonomi Desa. Selain itu juga akan diupayakan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan aparat desa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semua ini dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan.

6.9. *Penamaan jalan dan gedung terkait dengan identitas lokal.*

Kita adalah generasi yang sangat menghargai nilai-nilai dalam masyarakat dan sejalan dengan perkembangan pembangunan, maka hal-hal yang penting khususnya menyangkut identitas lokal perlu diabadikan dalam bentuk penamaan pada jalan-jalan, gedung-gedung dan tempat-tempat umum dan bersejarah.

7. Bidang Sosial Budaya dan Agama

7.1. Sosial Budaya

7.1.1. *Memberikan peran yang penting dari para Damang, dalam rangka peningkatan peran social Damang dalam masyarakat.*

Damang Kepala Adat sebagai lembaga sangat berperan dalam mengatur dan menata masyarakat adapt. Fungsi tersebut sangat penting dalam rangka penataan masyarakat oleh pemerintah. Oleh karena itu lembaga adat tersebut perlu terus didorong perannya untuk mendorong jalannya pemerintah yang baik.

7.1.2. *Meningkatkan keberadaan Museum.*

Untuk mengenal masa lalu lebih jauh maka Museumlah tempatnya. Jadi Museum tidak sekedar tempat penyimpanan barang kuno masa lalu, tapi lebih dari itu, museum menjadi wadah bagi pendidikan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan status dan koleksi museum menjadi salah satu langkah yang sangat penting. Selain itu, kami juga akan melaksanakan program kerja dalam rangka mendorong minat generasi muda agar cinta dan mau memanfaatkan museum dengan baik, sebagai tempat rekreasi maupun tempat pendidikan.

- 7.1.3. *Membangun forum lintas ide dan nilai.*
Bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan dan dibuat manusia adalah berawal dari ide namun tidak semua ide memiliki makna atau nilai positif bagi masyarakat. Karena itu untuk mengumpulkan ide-ide positif dan bermakna bagi kepentingan orang banyak, perlu dibangun wadah berupa forum lintas ide dan nilai.
- 7.1.4. *Mendorong dilakukannya dialog kebudayaan yang demokratis dan terbuka serta berkesinambungan, sebagai usaha mencegah benturan budaya menjadi konflik social.*
Memaklumi Heterogenitas budaya dewasa ini, maka dalam menjaga persatuan, kebersamaa dan persaudaraan di antara masyarakat perlu dibangun suatu dialog demokratis.
- 7.1.5. *Promosi budaya Kalimantan Tengah di ajang nasional dan internasional.*
Agar Kalimantan Tengah dikenal di ajang Nasional dan Internasional perlu ditingkatkan frekuensi promosi budaya. Hal ini terkait juga dengan upaya menarik wisatawan domestic dan mancanegara agar berminat melancong ke Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu digalakkan festival-festival seni/budaya daerah yang bertaraf lokal, nasional dan internasional.
- 7.1.6. *Membangun pusat kebudayaan Kalimantan Tengah di kota-kota besar di Indonesia.*
Sebagai upaya mendekatkan dan mengeratkan hubungan daerah-daerah lain bahwa Kalimantan Tengah juga memiliki budaya yang sejajar dengan daerah/saudara-saudara provinsi lain.
- 7.1.7. *Pembuatan monumen dan museum kebudayaan serta kampung seni.*
Kalimantan Tengah yang kaya akan budaya daerah, untuk itu perlu dibangun dan ditetapkan tempat dan lokasi yang patut dijadikan Museum kebudayaan dan kampung seni.
- 7.1.8. *Publikasi potensi daerah dan kebudayaan lokal.*
Mengupayakan pengembangan dan peningkatan penyebaran informasi tentang potensi dan budaya lokal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

7.2. Agama

Pembangunan dibidang Agama dititikberatkan pada peningkatan Iman dan Taqwa untuk masyarakat Kalimantan Tengah sesuai dengan Agamanya

masing-masing. Program-program yang akan dilakukan :

- 7.2.1. Peningkatan rumah-rumah ibadah untuk umat beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu/Hindu Kaharingan.
- 7.2.2. Peningkatan kerukunan umat beragama yang meliputi hubungan antar umat beragama, intern umat beragama dan hubungan umat beragama dengan pemerintah.

8. Bidang Kepemudaan

Menurut data statistic, jumlah Pemuda di Kalimantan Tengah $\pm 40\%$ dari penduduk Kalimantan Tengah yang $\pm 1,8$ juta jiwa atau ± 700 ribu orang. Potensi SDM ini perlu diberdayakan agar dapat memberi kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penguatan aktivitas pemuda di seluruh Kalteng khususnya di Pedesaan.
- Penguatan wawasan , kepedulian, perhatian, pemahaman, kesadaran dan partisipasi generasi muda melalui pembinaan organisasi, OKP, Pramuka, Karang Taruna, Senat Mahasiswa, OSIS dan lain-lain.
- Penguatan semangat keberagaman (multikulturalisme di kalangan pemuda sehingga dapat mencegah konflik yang bernuansa SARA yang mungkin muncul di Kalteng.
- Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi generasi muda untuk mendukung upaya pemulihan dan kebangkitan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran serta penyalahgunaan narkoba.
- Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi, profesionalisme dan daya saing tenaga kerja dan profesi dibidang kepemudaan.

Secara lebih rinci, bidang kepemudaan akan dibagi menjadi dua sub yakni Pramuka dan Olahraga :

8.1. *Pramuka*

Pramuka atau Praja Muda Karana sebagai sebuah organisasi kepanduan di Indonesia memiliki peminat yang cukup besar di Indonesia, khususnya di Kalteng. Sebagai lembaga yang sudah mengalami ujian waktu, kepramukaan telah memfasilitasi pencetakan kader-kader yang handal di kalangan generasi muda. Fasilitas penguatan kegiatan pramuka harus ditumbuhkan mulai dari sekolah-sekolah dasar di desa-desa di pedalaman sekalipun. Untuk memperkuat daya tariknya, maka perlu ada keterlibatan para tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga non Pemerintah secara luas. Pemerintah juga akan menguatkan sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-masing Kabupaten.

8.2. Keolahragaan

Adalah harapan semua orang untuk tampak sehat dan energik dan hal itu selalu dikaitkan dengan olahraga. Olahraga tidak hanya diperlukan untuk orang yang tampil sehat dan energik bagi masyarakat tapi dalam perkembangannya olahraga dikompetisikan untuk sebagai ajang penentuan prestasi bagi para olahragawan/kelompok sampai pada ajang mengejar prestise bagi suatu kelompok/daerah bahkan Negara/bangsa. Karena itu olahraga telah menjadi suatu komoditi yang harus diperhatikan dan dikembangkan di daerah Kalimantan Tengah.

Kita mengenal beberapa daerah yang telah menekuni beberapa cabang olahraga sebagai identitas daerah. Kalimantan Tengah pernah berjaya sebagai provinsi olahraga dayung. Olahraga dayung pernah identik dengan Kalimantan Tengah, karena kita pernah meraih prestasi yang luar biasa dalam kompetisi Nasional bergengsi yaitu PON. Tetapi beberapa tahun terakhir ini kebanggaan ini mulai sirna dan kebanggaan itu identitas sebagai Provinsi Dayung telah berpindah ke provinsi lain yakni Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

Upaya pengembangan olahraga memang tidak hanya persoalan prestasi tapi juga dalam rangka kita membangun masyarakat olahraga atau masyarakat sehat. Karena itu disamping upaya-upaya pembinaan prestasi, maka penggalakkan olahraga kemasyarakatan harus ditumbuhkan mulai dari desa. Kedepan kegiatan-kegiatan olahraga benar-benar ditumbuhkan dari masyarakat. Karena itu program-program baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan, keduanya harus mendapat perhatian. Kajian-kajian olahraga di daerah ini harus dilakukan lebih intensif agar penyiapan kader-kader olahragawan didapati secara berjenjang melalui kompetisi saringan yang ketat. Program yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

- 8.2.1. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi dalam mendukung Indonesia sehat 2010, yang berbasis pada kesehatan dan kebugaran jasmani, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan SDM dan kebangkitan prestasi olahraga.
- 8.2.2 Memfasilitasi, mendayagunakan, serta meningkatkan kualitas manajemen dan jumlah prasarana dan sarana untuk memberdayakan olahraga.
- 8.2.3 Meningkatkan partisipasi, pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi keolahragaan dalam mendukung pembangunan olahraga.

- 8.2.4. Memberdayakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas SDM olahraga.
- 8.2.5. Penerapan dan pemantauan Iptek di bidang olahraga, manajemen dan kualitas organisasi serta sarana dan prasarana olahraga.

9. Bidang Kepariwisataan

- 9.1. Peningkatan, pengembangan dan pemasaran pariwisata.
- 9.2. Peningkatan kunjungan para Turis baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri ke objek-objek wisata antara lain Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Arung Jeram, Agrowisata, dll.
- 9.3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata oleh swasta.

10. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

- 10.1. Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan dan perikanan yang aman dan ramah lingkungan.
- 10.2. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pembangunan pabrik baik di kota maupun di desa-desa lain, harus berwawasan lingkungan.
- 10.3. Terwujudnya keberdayaan perusahaan-masyarakat dalam mengembangkan pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam secara serasi.
- 10.4. Terwujudnya tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan pemeliharaan Tata Ruang.

11. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

- 11.1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- 11.2. Pembangunan fasilitas transportasi laut dan udara.
- 11.3. Meningkatkan kualitas kemitraan Pemerintah dan swasta dalam

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

- 11.4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di kecamatan.

12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

- 12.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah.
- 12.2. Peningkatan pembangunan desa/kelurahan tertinggal se Kalimantan Tengah.
- 12.3. Peningkatan pembangunan bagi masyarakat miskin (35% di Kalteng) untuk lebih sejahtera.
- 12.4. Peningkatan pengarusutamaan gender/tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan.
- 12.5. Peningkatan peran POSYANDU.
- 12.6. Peningkatan kerajinan Ibu Rumah Tangga.
- 12.7. Peningkatan peran PKK sampai kedesa/kelurahan.
- 12.8. Training pemberdayaan perempuan dalam rangka proses penataran gender dan mengoptimalkan peran organisasi perempuan. Penyetaraan gender senantiasa dikembangkan dalam hal ini focus pada pengembangan dan pemberdayaan perempuan sebagai upaya penyetaraan gender dengan antara lain mengoptimalkan peran organisasi perempuan.

Disamping 12 Misi pokok yang dijabarkan dalam Program Kerja tersebut, juga masih terus ditingkatkan *program lainnya* yang berkaitan untuk memajukan Kalimantan Tengah.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran dan rencana kebijakan yang akan kami kerjakan dalam lima tahun ke depan. Rencana-rencana di atas, termasuk di dalamnya potensi Kalimantan Tengah, akan menjadi konsentrasi dalam setiap kebijakan-kebijakan kami untuk lima tahun ke depan.

Akhirnya, kami tidak hanya menjanjikan perubahan, tapi perubahan dalam kesinambungan sambil terus meningkatkan kualitasnya. Kami menyusun masa depan Kalimantan Tengah dengan kepercayaan diri, optimisme dan rencana kerja yang jelas serta masuk akal. Kami tidak menjanjikan keajaiban, tapi dengan cara kerja keras tak kenal lelah. Inilah suara hati kami, suara dari mimpi terdalam kami, suara dari masa depan Bumi Tambun Bungai.

Palangka Raya, Oktober 2005

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

A. TERAS NARANG, SH
GUBERNUR

Ir. H. ACHMAD DIRAN
WAKIL GUBERNUR